ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG BINA MARGA DALAM

PEMBANGUNAN JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Anastasia Rizki Nilakandi Bachri

Marsuq

Frendly Albertus

*University of 17 Agustus 1945 Samarinda*

Jl. Ir. H. Juanda No. 80, 75124, Indonesia

…………………@gmail.com

*ABSTRACT*

 *The study entitled "Performance Analysis of the Public Works Office of Spatial Planning and Public Housing in Bina Marga in Road Development in East Kalimantan Province" raises the problem formulation of how the performance of the Public Works Office of Spatial Planning and Public Housing in Bina Marga in carrying out road construction in Kalimantan Province East. This research was conducted with the aim of finding out the performance of the Public Works Agency for Spatial Planning and Public Housing in Bina Marga in carrying out road construction in East Kalimantan Province. This research itself is a qualitative descriptive study. The focus of this research is the Quality, Responsiveness and Accountability of the Public Works Department of Spatial Planning and Public*

 *Based on the results of the study, the Performance of the Public Works Office of Spatial Planning and Public Housing in the Highways Sector is quite good. based on the road construction work carried out by the Public Works Office of Spatial Planning and Public Housing in the Highways Sector, it can be seen that it has been done to the maximum. However, there is still road construction work which is considered to be still not optimal.*

***Keywords: Performance Analysis of the Public Works Agency for Spatial Planning and Public Housing in Bina Marga in Road Development in East Kalimantan Province***

**PENDAHULUAN**

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah memenuhi hak - hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu layanan, pelayanan nya bisa meliputi : pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan tidak terkecuali pelayanan yang berhubungan dengan infrastruktur, seperti penyediaan jalan untuk transportasi adanya infrastruktur berupa jalan dan jembatan dapat membantu masyarakat untuk dipergunakan dalam kegiatan mereka sehari-hari.

 Penyediaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan ini merupakan salah satu tugas pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. UU No. 38 Th 2004, yang berbunyi “jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, ayat (2) yang berbunyi “jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara” .dan ayat (3) yang berbunyi “jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Dinas PUPR dan PERA sebagai instansi dan Bidang Bina Marga selaku yang menerima tugas dalam melaksanakan pembangunan jalan dalam pelaksanaan pelayanan publik masih ditemui beberapa masalah terkait penyelenggaraan pembangunan jalan di provinsi kalimantan timur. Misalnya masih banyak didapati jalan yang mengalami kerusakan baik kerusakan ringan sampai kerusakan parah. Bahkan masih ada juga keterlambatan pekerjaan pembangunan jalan yang tidak kunjung selesai, hal ini jelas membuat masyarakat resah dan membahayakan masyarakat dalam berkendara jika melewati jalan yang rusak atau tidak dapat digunakan, permasalahan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan dan spekulasi tertentu. Misalnya bagaimana prosedur penyelenggaraan pembangunan jalan di daerah provinsi kalimantan timur? Apakah kerusakan yang terjadi semata mata dikarenakan kelalaian Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur? Ataukah ada faktor faktor lain yang menyebabkan kerusakan jalan tersebut? Dan mengapa banyak pembangunan jalan yang mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan? Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu dilakukannya penelitian tentang : Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga dalam pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

**Rumusan Masalah**

 Penelitian ini memfokuskan pada satu pokok pembahasan yaitu :

 Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat bidang bina marga dalam penyelenggaraan pembangunan jalan di provinsi kalimantan timur?

**Tujuan Penelitian**

 Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

 Untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga Provinsi Kalimantan Timur.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Teori dan Konsep**

 Menurut Sneclbecker dan Lexi Moelong (2004:57) mendefinisikan “teori sebagai seperangkat proporsi yang terintregasi secara sintaksis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data atau dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana atau meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambing bahasa)

 Menurut Bahri (2008:30) menguraikan pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berpraga. Konsep sendiripun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata

**Kinerja**

 Pengertian Kinerja Menurut para Ahli :

a. Menurut Wirawan (2009:6-8) kata kinerja berasal dari singkatan dari kata performance (bahasa inggris), yang sering diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai performa.

b.Menurut Hasibuan (2002:160), kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan kecerdasannya, usaha serta kesempatan yang dilakukannya.

c.Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, (2006:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

d.Menurut Mangkuprawira dan hubeirs, (2007:153) kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan

 Dari pendapat diatas dapat simpulkan bahwa kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi/perusahaan.

**Pembangunan**

 Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli . Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan 17 pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995 : 13). Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

**Pembangunan Daerah**

 Pengertian Daerah Menurut Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, pengertian daerah berbeda – beda tergantung aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999 : 107-108) :

a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut 21 terdapat sifat – sifat yang sama. Kesamaan sifat – sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.

b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.

c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

**Pengertian Jalan**

 Berdasarkan Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan didefinisikan Jalan adalah prasarana trasnportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan tertentu. Jalan umum dikelompokan menurut sistem, fungsi, status dan kelas. Sedangkan untuk pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan, dikelompokkan atas jalan bebas hembatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil

Menurut Adji Adisasmita (2011:79), “Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air serta dipermukaan air”. artinya jalan merupakan sarana trasnportasi darat yang meliputi rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, pagar pembatas jalan, penghubung jalan seperti jembatan, dan lain sebagainya.

Menurut Rinaldi Mirsa (2011:54) “dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bagian berkelanjutan dari pola yang ada sebelumnya”. artinya jalan yang dibangun saat ini merupakan jaringan yang saling berhubungan yang telah direncanakan sejak lama dan bersifat berkelanjutan dari waktu ke waktu dan akan terus berkembang sampai menjadi pola jaringan yang ideal.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

 Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan segala peristiwa yang diperoleh, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga dalam Pembangunan Jalan Provinsi Kalimantan Timur"

 Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Dalam penentuan subyek penelitian harus memiliki kriteria tertentu. Menurut Moloeng (2007;132) persyaratan penentuan subyek penelitian yaitu :

harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

Menurut Nasution (2001;43) “subyek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara porposif dan pelaksanaanya sesuai dengan purpose atau tujuan tertentu”

 Berdasarkan uraian tersebut,maka yang dijadikan subyek penelitian adalah Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Seksi Jalan, dan beberapa pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dipilihnya para responden ini, dikarenakan merekalah yang mengetahui secara jelas bagaimana kegiatan pekerjaan berlangsung bagaimana keadaan dan aktivitas yang terjadi di lapangan.

**Teknik Pengumpulan Data**

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau cara-cara sebagai berikut:

1.Wawancara

 Wawancara akan ditetapkan kepada respoden yang terpilih secara individu maupun dengan pokok kunci atau orang yang kompeten dengan masalah peneliti tersebut, untuk melengkapi data yang belum terungkap oleh kuesioner.

2.Observasi

 Observasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek, yang diteliti dan diambil dari hasil pengamatan gejala yang ada dan yang dapat menunjang penelitian

3.Dokumentasi

Pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis (dokumen) yang langsung berhubungan dengan objek penelitian.

**Analisis Data**

 Teknik Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan Analisis Model Interaktif Miles dan Huberman 2009:148 yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verfikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Idrus, 2009;148)

 Dalam teknik analisis data ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data awal dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian. Seorang peneliti dapat menemukan waktu kapan saja untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara, dan dari berbagai dokumen yang dimiliki.

3. Melaksanakan display data

Penyajian data dalam bentuk kategorisasi setiap data yang di dapat, penyajian data biasanya digunakan teks berbentuk naratif.

4. Mengambil Keputusan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah data yang telah proses dan telah disusun kemudian diambil kesimpulan atau makna dari kata yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus memprediksikan melalui pengamatan yang ada.

 Lokasi dalam kajian penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Jalan Tengkawang No.01 sungai kunjang samarinda Kalimantan Timur 75027 berdasarkan pertimbangan atas data yang diperlukan dan adanya gejala yang sesuai dengan judul penelitian.

Waktu penelitian merupakan kegiatan yang satu sama yang lain berhubungan. Untuk itu perlu disusun jadwal kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu yang telah direncanakan. Adapun jadwal rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2020 penulis mengadakan observasi dan studi keperpustakaan guna mengumpulkan data awal serta teori dan konsep yang dapat mendukung penelitian ini untuk selanjutnya mengadukan proposal penelitian.

2. Bulan Januari 2020, setelah proposal penelitian disetujui langkah berikutnya adalah penulisan Bab I hingga Bab III, konsultasi dengan dosen pembimbing dan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengansaran dari dosen pembimbing.

3. Bulan Februari 2020, persiapan dan pelaksanaan mengikuti Seminar Proposal.

4. Bulan Maret 2020, Penulis melakukan pelaksanaan penelitian lapangan

5. Bulan April 2020, Penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai saran dari dosen pembimbing.

6. Bulan Mei 2020, Ujian Akhir Skripsi.

**HASIL PENELITIAN**

**Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

 Profil Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat pada umumnya terletak di Jalan Tengkawang No. 01 Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur merupakan instansi yang didirikan oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP/150/A/KPTS/1966 pada tanggal 3 Desember 1966 ditetapkan sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum atau lebih dikenal dengan Hari Bakti. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas adalah merupakan salah satu instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kaltim.

**Sistem Pekerjaan**

 Sistem pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga telah dilaksanakan dengan baik dan sistematis. seperti yang disampaikan oleh Bapak Irhamsyah, ST.,MT yang mengatakan :

 “Sistem Pekerjaan pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Timur ini sudah dilakukan dengan sangat baik, dalam sistem pelaksanaan pembangunan jalan di provinsi Kalimantan timur hal pertama yang dilakukan yaitu dilakukannya SID (Survey Investigasi desain) atau perencanaan, disitu kita melihat kondisi jalan yang akan kita perbaiki dan apa saja sasaran yang ingin dicapai, setelah itu dilakukan pelaksanaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan yaitu kontraktor, dan setelah dilakukan pekerjaan dilapangan kemudian dilakukannya pemeliharaan jalan, yang mana pemeliharaan ini bertujuan untuk membuat jalan terus fungsional yang dapat di gunakan masyarakat dan tentunya sangat berperan penting bagi kelancaran masyarakat untuk melakukan segala aktifitasnya. (Hasil Wawancara 13 April 2020).

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga sudah cukup baik dan sistematis. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem pekerjaan yang melalui sistem perencanaan, kemudian pelaksanaan fisik di lapangan dan yang terakhir dilakukannya pemeliharaan jalan yang bertujuan untuk terwujudnya pembangunan jalan yang berguna bagi masyarakat.

**Kondisi Pekerjaan**

 Kondisi pekerjaan yaitu situasi atau keadaan yang ada pada pekerjaan tersebut. Kondisi pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga telah cukup baik akan tetapi masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan pembangunan jalan yang belum maksimal, seperti yang disampaikan oleh Bapak Irhamsyah, ST.,MT Selaku Kepala Bidang Bina Marga yang mengatakan :

 “Kondisi pekerjaan pembangunan jalan diprovinsi kalimantan timur sudah dilakukan dengan cukup baik, akan tetapi memang saat ini kondisi ruas jalan yang sudah maksimal baru 61,45% dan yang tidak maksimal di 38,5% yaitu kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan ringan hingga kerusakan berat, Tentunya kita sangat berharap pekerjaan yang dilakukan kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan yang kita harapkan yaitu tepat mutu dan tepat sasaran , Meskipun begitu terkadang tidak semua pekerjaan yang dihasilkan selalu baik terkadang pekerjaan dilapangan pun memiliki kendalanya masing-masing, akan tetapi kita terus mengawasi pelaksana pekerjaan agar selalu melakukan pekerjaan dengan maksimal.” (Hasil wawancara, tanggal 13 April 2020)

 Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa kondisi pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga telah dilaksanakan dengan cukup baik akan tetapi masih banyak juga pekerjaan pembangunan jalan yang masih mengalami masalah kerusakan, dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat kondisi pekerjaan inilah yang perlu ditingkatkan lagi kualitas pekerjaannya, agar kualitas pekerjaan dilapanganpun menjadi optimal.

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga Provinsi Kalimantan Timur telah ada dikondisi yang cukup baik hal ini dapat dilihat dengan presentase 61,45% pembangunan jalan yang sudah mencapai maksimal, meskipun begitu Kondisi ini terbilang masih kurang baik mengingat hampir setengah dari pembangunan jalan yang ada di provinsi Kalimantan timur masih mengalami kerusakan yakni 38,5%. Kurangnya kualitas pelaksana pekerjaan menjadi salah satu faktor kondisi pekerjaan menjadi kurang maksimal

**Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan yang dimaksud disini adalah ketepatan dalam melaksanakan pekerjaan, artinya adanya kesesuaian antara rencana kerja dengan sasaran atau waktu dan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugiono, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu :

 “Jadi seperti yang kita ketahui setiap pekerjaan pembangunan jalan yang akan dilakukan telah diberi jangka waktu nya masing-masing,didalam kontrak pun telah kita sebutkan jangka waktu yang akan dilaksanakan, jadi pelaksana pekerjaan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan apabila juga pekerjaan melewati batas waktu yang telah ditentukan, kami Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga memberlakukan denda kepada pelaksana pekerjaan (kontraktor) sehingga dengan adanya aturan ini pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dapat selesai dengan optimal.(Hasil Wawancara 14 April 2020).

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap pekerjaan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga telah diberi jangka waktu pelaksanaannya, dan apabila pekerjaan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga memberlakukan denda kepada pelaksana pekerjaan (Kontraktor).

 Berdasarkan dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat bidang bina marga telah melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan dengan cukup tepat waktu. Meskipun begitu masih ditemui pekerjaan pekerjaan pembangunan jalan yang melewati batas waktu yang telah ditentukan/tidak tepat waktu, maka perlu manajemen yang baik dan peningkatan kualitas SDM agar pekerjaan bisa dilaksanakan dengan optimal

**Responsivitas**

 Responsivitas menggambarkan kemampuan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, Responsivitas dalam penyelenggaraan pembangunan jalan ada beberapa indikator yang dipakai yaitu responsif, serta cermat terhadap semua keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

**Responsif terhadap pengaduan masyarakat**

 Responsif terhadap pengaduan masyarakat merupakan bagaimana Dinas Pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat bidang bina marga dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan diprovinsi Kalimantan timur dapat merespon keluhan masyarakat secara responsif dan aktif, dan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Bina Marga menanggapi setiap pengaduan dari masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Enik Sudartik selaku Staf Bidang Bina Marga, beliau mengatakan :

 “Kami menganggap dengan adanya media massa dan masyarakat dalam proses pembangunan jalan ini sangat berperan penting untuk meningkatkan kinerja dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat bidang bina marga. Karena dari masyarakat dan media massa pihak dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat bidang bina marga menjadi tau apa saja yang diinginkan masyarakat untuk pembangunan ini dan apa saja keluhan masyarakat dengan adanya pembangunan jalan di provinsi kalimantan timur.” (Hasil Wawancara,13 April 2020)

 Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga cukup responsive terhadap pengaduan dari masyarakat baik itu melalui surat ataupun masyarakat yang datang langsung kekantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga, akan tetapi memang tidak semua keluhan bisa diatasi dengan cepat karena pekerjaan pembangunan jalan pun cukup banyak dan jarak tempuh ke masing-masing pekerjaan pun cukup jauh sehingga tidak semua dapat keluhan bisa cepat diatasi.

**Cermat Terhadap Pengaduan Masyarakat**

Cermat terhadap pengaduan masyarakat yang dimaksud disini adalah bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat menyikapi setiap pengaduan dengan teliti, hati-hati dan sungguh-sungguh. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga menyikapi setiap keluhan dan aduan dari masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sabran, ST selaku Staf Bidang Bina Marga yang mengatakan bahwa

 Berdasarkan wawancara diatas bisa dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga telah merespon keluhan masyarakat dengan teliti, dilihat dari setiap pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga akan langsung ditindak lanjuti dengan langsung mengecek ke lapangan untuk memastikan keluhan dari masyarakat tersebut benar adanya.

 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga telah teliti dan cermat dalam merespon setiap keluhan dan masukan dari masyarakat, karna setiap keluhan yang masuk akan selalu di cek terlebih dahulu apakah keluhan tersebut benar adanya sesuai dengan keadaan yang ditemukan di lapangan, dan mekanisme dalam pengaduan pun tidak susah dan sangat mudah, masyarakat bisa datang langsung kekantor maupun mengirimkan surat yang keduanya dapat samasama direspon dengan baik.

**Kredibilitas**

 Berdasarkan wawancara yang peniliti lakukan dengan Bapak Irhamsyah, ST.,MT dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga dalam setiap pekerjaan pembangunan yang dilakukan dapat dipercaya oleh masyarakat melihat setiap pekerjaan pembangunan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga telah diawasi dan didampingi oleh Badan Pemerintahan yang berwenang.

 Berdasarkan wawancara yang telah peniliti lakukan bersama bapak Muhran, ST dapat dikatakan bahwa selain memiliki pihak eksternal yakni Inspektorat dan BPK, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat pun memiliki pihak internal dalam setiap pekerjaan pembangunan nya yakni tenaga pengawas dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga dan juga konsultan, yang masing masing bertugas untuk melakukan pengawasan serta membantu kelancaran pekerjaan terhadap pembangunan yang ada di provinsi kalimantan timur.

**Transparansi**

 Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Hendriawan tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Bidang Bina Marga cukup terbuka dan transparan terhadap anggaran yang disiapkan untuk setiap kegiatan pembangunan jalan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, serta masyarakat dapat mengetahui bagaimana penggunaan dana tersebut dikeluarkan dalam kegiatan pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga cukup terbuka terhadap masyarakat, dapat dilihat dari masyarakat dapat mengetahui anggaran dan dana yang disalurkan kepada setiap kegiatan pembangunan jalan yang ada pada daerahnya, dan masyarakat pun bisa mengontrol serta mengawasi bersama setiap proses pekerjaan pembangunan jalan yang sedang dikerjakan dilapangan.

**Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Kualitas**

 Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf derajat suatu pekerjaan. Kualitas sendiri menyangkut antara sistem pekerjaan kondisi pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kualitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga sudah cukup baik dan ada yang kurang baik. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Irhamsyah, ST.,MT Selaku Kepala Bidang Bina Marga.

Pekerjaan yang terlaksana dengan sistematis, dan penyelesaian pekerjaan yang sudah cukup tepat waktu menjadi faktor Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga terbilang cukup baik, akan tetapi ada juga faktor yang masih kurang baik seperti yang dapat dilihat bahwa pekerjaan dalam pembangunan jalan di provinsi Kalimantan timur yang terbilang maksimal baru 61%.

**Responsivitas**

 Responsivitas ialah kemampuan aparatur dalam mengatisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntunan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi hanya merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Resposivitas disini menunjuk pada kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan responsifitas di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga terkait kecepatan dan kecermatan dalam memberikan pelayanan di nilai sudah sangat baik. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara bersama bapak Muhammad Yusuf , Ibu Enik Sudartik dan Bapak Sabran selaku Staf Bidang Bina Marga.

Faktor yang membuat responsifitas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga ini dibilang cukup baik. Diantaranya setiap keluhan dari masyarakat sudah di respon dengan cepat dan cermat bisa dilihat masyarakat bisa datang langsung ataupun mengirim surat kekantor dan juga masyarakat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga bisa mengecek langsung bersamasama kelapangan apabila terjadi ketidaksesuaian pekerjaan dilapangan

**Akuntabilitas**

 Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggunggjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Bapak Muhran, ST maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga sudah cukup baik, dilihat dari pekerjaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga telah diawasi oleh beberapa lembaga yang berwenang, kemudian masyarakat bisa mengawasi dan mengontrol bersamasama setiap pekerjaan pembangunan jalan yang ada didaerahnya, maka dapat dikatakan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga sudah cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Kesimpulan**

 Setelah mencermati dan mengkaji tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga dinilai sudah cukup baik dikarenakan setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga telah dilakukan secara sistematis, dan penyelesaiannya pun telah selesai dengan tepat waktu, namun memang tidak semua pekerjaan selesai dengan maksimal, karna dapat dilihat pekerjaan pembangunan jalan yang maksimal baru 61% maka jalan yang masih dalam kondisi rusak masih banyak ditemui di provinsi Kalimantan timur, kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pembangunan jalan di provinsi Kalimantan timur.

2. Berdasarkan Responsivitas dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga dinilai sudah cukup baik, dapat dilihat dengan setiap aduan dari masyarakat direspon dengan sangat baik oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga, masyarakat yang ingin mengadukan setiap keluhannya juga dapat langsung kekantor maupun dengan mengirim surat, dan setiap masyarakat bisa dapat mengecek langsung kelapangan bersamasama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga untuk mengetahui kondisi dilapangan yang dikeluhkan oleh masyarakat.

3. Begitupula dengan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga, Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga sudah cukup baik, dengan adanya pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang dan masyarakat setempat, maka pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat telah transparansi dan kredibilitasnya dapat dipercaya.

**Saran**

 Upaya untuk lebih meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga, terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga, yaitu :

1. Menambah Tenaga Kerja atau Sumber Daya Manusia dalam pembangunan jalan di provinsi Kalimantan timur, kemudian menambah pengetahuan dan peningkatan keterampilan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga dengan mengadakan pelatihan-pelatihan agar menghasilkan tenaga kerja pegawai yang berkualitas dan pekerjaanpun menjadi maksimal

2. Melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan jalan yang sudah dilakukan maupun yang baru akan dilakukan di provinsi Kalimantan timur, sehingga masyarakat mengerti dan paham tentang pembangunan jalan yang akan dilakukan didaerahnya.

3. Menambah inovasi-inovasi baru serta menambah sarana prasarana yang lengkap, agar pembangunan jalan yang dilakukan di provinsi Kalimantan timur dapat berjalan dengan jauh lebih baik dan maksimal.

**Daftar Pustaka**

Moloeng, Lexy J.2007, Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, Mathew, B dan Huberman, Michael penterjemah Tjetbeb rohendi, R, 1992 Analisis data kualitatif, UI Press Jakarta.

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Aan Komariah, Djam’an Satori, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta

Agus Dwiyanto (2013:178)” H. Achmad Amins, Dr. MM - “Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah” - Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA - Penerbit Laksbang Pressindo Jojakarta, Samarinda 2009.

Miles, Mathew B.&A>Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia.

Wirawan (2009), Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian, Jakarta, Penerbit : Salemba Empat.

Hasibuan, Malayu, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta

Anwar Prabu Mangkunegara, tahun 2006, Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia, Pen, PT Refika Aditama

Mangkuprawira. S dan Aida V. Hubeis (2007). Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia. Bogor

Rival dan Basri (2005:42)” H. Achmad Amins, Dr. MM - “Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah” - Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA - penerbit Laksbang Pressindo Jojakarta, Samarinda 2009

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratukusumah, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Siagian Sondang P, 1994, Administrasi Pembangunan, Gedung Agung, Jakarta.

Deddy T. Tikson. 2005 Indikator - indikator Pembangunan Ekonomi

Adji Sasmita, Sakti. 2011, Transportasi dan Pengembangan Wilayah. Penerbit : Graha Ilmu : Yogyakarta

Mirsa, Rinaldi 2011. Elemen Tata Ruang Kota, Yogyakarta : Graha Ilmu

Peraturan Perundangan :

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 3 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 38 Th. Tentang Jalan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional